



L A P O R A N
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN SUMENEP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum Daerah.....	5
1. Kondisi Geografis Daerah.....	5
2. Gambaran Umum Demografis.....	7
BAB. II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	10
A. Visi dan Misi.....	10
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	11
1. Strategi.....	11
2. Arah Kebijakan.....	11
C. Prioritas Daerah.....	11
BAB. III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12
A. Pengelolaan Belanja Daerah.....	12
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	13
2. Target Dan Realisasi Belanja	13
3. Permasalahan dan Solusi.....	15
BAB.IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	18
A. Urusan Wajib yang dilaksanakan.....	18
1. Program Dan Kegiatan.....	18
2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.....	20
3. Permasalahan Dan Solusi.....	24
B. Urusan Pilihan.....	24
BAB. V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	28
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima.....	28
1. Dasar Hukum.....	28
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	28
3. Organisasi Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan.....	28
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya.....	28
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran.....	28

6. Permasalahan Dan Solusi.....	31
B. Tugas Pembantuan Yang Di Berikan.....	31
BAB. VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	32
A. Kerja Sama Antar Daerah	32
B. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	32
1. Kebijakan dan Kegiatan.....	33
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	36
3. Permasalahan dan Solusi.....	37
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.....	73
D. Pembinaan Batas Wilayah.....	73
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	73
F. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	73
G. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.....	73
BAB. VI. PENUTUP.....	74
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2020, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2020 ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kepada masyarakat dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep. Hal ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan strategik untuk mendukung budaya transparansi, yaitu lebih merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami harapkan masukan konstruktif dan inovatif dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun berikutnya untuk dapat menggambarkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik serta dapat meningkatkan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sumenep, Februari 2020

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN SUMENEP**



Ir. MOHAMMAD JAKFAR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 1963014 199210 1 002

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan meliputi penataan ruang, pendayagunaan sumberdaya air dan menyediakan sebagian prasarana dan sarana dasar (jalan lingkungan, perumahan, permukiman dan utilitasnya). Dalam rangka mewujudkan kawasan terbangun berupa kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan tertentu.

A.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Th. 2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.

1. **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. **Sekretaris Dinas** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
2. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan ;
3. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan ;
4. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ;
5. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

3. **Bidang Penataan Ruang** mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas penataan ruang ;
2. Pengelolaan dan penganalisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi pengembangan tata ruang ;
3. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi tata ruang
4. Pelaksanaan survey, pemetaantataruang ;
5. Pelaksanaan bantuan teknis serta upaya penataan ruang ;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Bidang Penataan Ruang membawahi :

- a. Seksi Pengaturan Pertanahan dan Pengendalian ;
- b. Seksi Pembinaan;
- c. Seksi Pembangunan dan Pengawasan ;

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

4. Bidang Penataan Bangunan

dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan bangun gedung, lingkungan pemukiman dan jasa konstruksi

Bidang Pembangunan dan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pembangunan dan lingkungan pemukiman ;
2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan dan lingkungan pemukiman ;
3. Pelaksanaan bantuan teknis serta upaya keselamatan pembangunan gedung negara dan lingkungan pemukiman ;
4. Pengolahan analisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi pengembangan pembangunan dan pemeliharaan gedung Negara dan lingkungan pemukiman ;
5. Pelaksanaan bantuan teknis berupa jasa konstruksi ;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bangunan dan pemeliharaan gedung negara dan lingkungan pemukiman ;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pembangunan dan Lingkungan Permukiman terdapat 3

Seksi diantaranya :

- a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus ;
- b. Seksi Bangunan Gedung ;
- c. Seksi Bina Konstruksi ;

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.

5. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumahan dan perbaikan lingkungan, penyediaan air minum serta penyelenggaraan sanitasi. Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perumahan ;
2. Pemberian bantuan perencanaan teknis perbaikan dan peremajaan perumahan ;
3. Pemberian pembinaan dan pengaturantata perumahan ;
4. Pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan ;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemberian rekomendasi izin perumahan dan kawasan perumahan ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perumahan terdapat 3 Seksi diantaranya :

- a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
- b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, tetapi sampai saat ini kelompok jabatan dimaksud belum ada.

7. UPT Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana yang

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya di wilayah kecamatan. UPT Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, dipimpin oleh seorang Kepala UPT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas dibidang administrasi. Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Sumenep yang berada di ujung timur Pulau Madura, terletak diantara $113^{\circ} 32' 54''$ – $116^{\circ} 16' 48''$ Bujur Timur dan diantara $4^{\circ} 55'$ - $7^{\circ} 24'$ lintang selatan, dengan batas-batas wilayah di sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Laut Jawa /Selat Flores, sebelah selatan Selat Jawa dan di sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Pamekasan.

b. Luas Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep dengan luas wilayah $2.093.457.573\text{Km}^2$ terbagi dalam 2 (dua) wilayah, yaitu wilayah Sumenep daratan dengan luas $1.146,927065\text{Km}^2$ atau 54,79%; dan wilayah Sumenep Kepulauan dengan luas $946,530508\text{Km}^2$ atau 45,21 % meliputi 126 buah pulau besar dan kecil. Pulau paling utara adalah Pulau Karamian (Kecamatan Masalembu) dengan jarak ± 151 mil laut dan pulau paling timur adalah Pulau Sakala (Kecamatan Sapeken) berjarak ± 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget.

Secara administratif Kabupaten Sumenep terbagi atas 27 Kecamatan (sembilan Kecamatan Kepulauan dan 18 Kecamatan Daratan), 328 Desa dan 4 (empat) wilayah kelurahan.

Tabel 1
Jenis Tanah dan Wilayah Penyebarannya di Kabupaten Sumenep

No.	Jenis Tanah	Wilayah Penyebaran
1.	Alluvial KelabuKekuningan	Sumenep, Ambunten
2.	Komplek Mediteran Merah dan Latosol	Kalianget, Talango, Batuputih, Dasuk, Pasongsongan, Gading, Guluk-Guluk, Lenteng, Gapura, Dungkek, Pragaan, Bluto, Giligenting dan Saronggi
3.	AsosiasiLitosol dan MediteranCoklatKemer ahan	Talango, Ganding, Guluk-Guluk dan Lenteng
4.	KomplekMediteranMera h	Manding, Rubaru, Guluk-Guluk dan Lenteng
5.	Grumosol	Manding, Rubaru, Guluk-Guluk, Lenteng, Batang- BatangdanPragaan
6.	Regosol	Manding, Rubaru, Guluk-Guluk, Lenteng dan Pragaan
7.	Litosol	Manding, Rubaru, Guluk-Guluk, Lenteng, Pragaan dan Batang- Batang
8.	GrumosolKelabu	Guluk-GulukdanLenteng
9.	Alluvial KelabuKemerahan	Ganding, Guluk-Guluk dan Pragaan
10.	AluvialHidromorf	GiligentingdanPragaan

c. Topografis

Topografi Kabupaten Sumenep umumnya tergolong **dataran rendah** dengan **sedikit berbukit** di bagian tengah, mempunyai ketinggian tempat **sedang** dan kemiringan tanah *landai*, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Topografi Kabupaten Sumenep

No	Kategori	Uraian	Luas (Ha)	%
A.	Ketinggian Tempat			
	1. Rendah	0 – 25 m dpl	65.951	33
	2. Sedang	25 – 100 m dpl	79.942	40
	3. Tinggi	> 100 m dpl	53.961	27
B.	Ketinggian Tempat			
	1. Datar	0° – 2°	51.962	26
	2. Landai	2° – 15°	125.908	63
	3. Miring	> 15°	21.984	11

2. Gambaran Umum Demografis

Dari hasil estimasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Sumenep dilaporkan sekitar 1.133.755 jiwa dengan pertumbuhan sekitar 0,52%. Kepadatan penduduk Sumenep tahun 2019 adalah 526 jiwa setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Sementara itu, perlu diperhatikan jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan jenis kelamin terlihat sebanyak 551.400 penduduk laki-laki dan 582.355 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian terlihat bahwa proporsi penduduk perempuan Nampak lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki.

Tabel 3
Jumlah Kepadatan dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan
1.	Pragaan	32.919	34.436	67.355	1.123
2.	Bluto	23.971	25.039	49.010	923
3.	Saronggi	18.454	20.118	38.572	544
4.	Giligenting	11.618	12.805	24.423	793
5.	Talango	18.732	20.784	39.516	821
6.	Kalianget	21.386	22.821	44.207	1.358

7.	Sumenep	38.386	40.556	78.942	2.540
8.	Batuan	6.602	6.902	13.504	433
9.	Lenteng	31.209	33.086	57.321	860
10.	Ganding	18.371	19.299	37.670	709
11.	Guluk-guluk	25.040	26.251	51.291	888
12.	Pasongsongan	25.778	26.139	51.917	393
13.	Ambunten	19.780	21.712	38.024	784
14.	Rubaru	19.961	21.057	41.018	448
15.	Dasuk	15.043	15.954	30.997	466
16.	Manding	14.981	15.970	30.951	409
17.	Batuputih	21.477	23.234	44.711	391
18.	Gapura	18.762	20.170	38.932	583
19.	Batang-Batang	27.041	28.865	55.906	670
20.	Dungkek	17.300	18.965	36.265	601
21.	Nonggunong	6.667	7.060	13.727	361
22.	Gayam	15.879	17.207	33.086	398
23.	Ra'as	17.184	17.916	35.100	918
24.	Sapeken	24.077	24.247	48.324	199
25.	Arjasa	37.821	38.287	76.108	254
26.	Kangayan	11.324	11.623	22.947	107
27.	Masalembu	11.637	11.852	23.489	569
	Jumlah	551.400	582.355	1.133.755	516

Sumber : BPS tahun 2019

3. Kondisi Ekonomi

- a) Potensi Unggulan Daerah
- b) Pertumbuhan Ekonomi / PDRB (tiga tahun terakhir)

Pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor konstruksi bangunan adalah sebagai berikut : tahun 2016 sebesar 8,38 %, tahun 2017 sebesar 7,88 %, tahun 2018 sebesar 8,06 %. Dari data BPS tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi pertumbuhan yang cenderung stabil khususnya pada sektor konstruksi bangunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

PERENCANAAN KJNERJA

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 ada 6 Misi, dan Tugas dan Fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Sumenep bertanggungjawab untuk mewujudkan **Misi ke – 2 yaitu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan Dan Daratan yang Didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan**” dengan Tujuan: **“Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan dan Wilayah Kepulauan**”. Sedangkan **Sasarannya** adalah

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Permukiman
2. Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau
3. Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Lingkungan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016 – 2020; maka dirumuskan Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

Sasaran 1, dirumuskan melalui **Strategi** :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, yang selanjutnya dirumuskan dalam **2Arah Kebijakan** yaitu, Mengembangkan pembangunan sarana sanitasi dan Mengembangkan pemeliharaan sarana sanitasi.
2. Meningkatkan ketersediaan Fasilitas Air Bersih, yang selanjutnya dirumuskan

dalam **2 Arah Kebijakan** yaitu, Mengembangkan pembangunan Fasilitas Air Bersih dan Mengembangkan pengelolaan Fasilitas Air Bersih untuk masyarakat.

3. Meningkatkan ketersediaan permukiman yang layak huni, yang selanjutnya dirumuskan dalam **2 Arah Kebijakan** yaitu, Mengembangkan upaya peningkatan kualitas permukiman dan Mengembangkan upaya peningkatan pembangunan rumah layak huni.

Sasaran 2, dirumuskan melalui **Strategi** :

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang selanjutnya dirumuskan dalam **Arah Kebijakan** yaitu, Mengembangkan upaya peningkatan penataan ruang.
2. Penataan Ruang, yang selanjutnya dirumuskan dalam **Arah Kebijakan** yaitu, Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.

Sasaran 3, dirumuskan melalui **Strategi** :

1. Meningkatkan ketersediaan Bangunan Gedung yang laik pakai, yang selanjutnya dirumuskan dalam **Arah Kebijakan** yaitu, Mengembangkan upaya peningkatan kualitas Bangunan Gedung.
2. Meningkatkan ketersediaan Perusahaan jasa konstruksi yang berkualitas, yang selanjutnya dirumuskan dalam **Arah Kebijakan** yaitu, Mengembangkan pembinaan jasa konstruksi.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2020
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Permukiman	- Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%
		- Persentase jumlah rumah tangga yang bersih terlayani fasilitas air bersih	95%
		- Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0%
2.	Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau	Persentase tersedianya luasan RTH publik	42%
3.	Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Drainase	- Persentase bangunan yang laik fungsi	85%
		- Persentase berkurangnya jumlah titik genangan air	0%

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dari 3 sasaran strategis yang diperjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

1. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2020	REALISASI TH. 2020	% CAPAIAN TH. 2020
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Permukiman	- Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	83,51%	83,51%
		- Persentase jumlah rumah tangga yang bersih terlayani fasilitas air bersih	95%	83,51%	87,91%
		- Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0%	2,89%	97,11%
2.	Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau	Persentase tersedianya luasan RTH publik	42%	26%	62%
3.	Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Drainase	- Persentase bangunan yang laik fungsi	85%	50%	59%
		- Persentase berkurangnya jumlah titik genangan air	0%	35%	65%

2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian realisasi kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	Indikator kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	1. - Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	84,62%	100%	83,51%
	-Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	89%	84,62%	95%	83,51%
	-Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	0%	2,99%	0%	2,89%
Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang	1. Persentase tersedianya luasan RTH Publik	37%	26%	42%	26%
Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Drainase	- Persentase bangunan yang laik fungsi	75%	0%	85%	50%
	- Persentase berkurangnya jumlah titik genangan air	50%	30%	0%	70%

3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD/RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA TH. 2020	REALISASI TH. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	- Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	83,51%	83,51%
		- Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	95%	83,51%	87,91%
		- Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0%	2,89%	97,11%
2.	Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik	42%	26%	62%
3.	Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Drainase	- Persentase bangunan yang laik fungsi	85%	0%	0%
		- Persentase berkurangnya jumlah titik genangan air	0%	35%	65%

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas, fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020, menunjukkan kinerja BAIK. Disamping itu apabila dikaitkan dengan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang terkait dengan

tugas, fungsi dan kewenangannya dan dampak nyatanya yang dapat langsung digambarkan sebagai berikut :

1. Analisis antara target dan realisasi Kinerja
2. Analisis terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Analisis realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Hasil analisis terhadap kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep pada umumnya tingkat pencapaian kinerja baik.
5. Analisis Pencapaian Kinerja Kebijakan
Hasil analisis terhadap kinerja kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep, pada umumnya tingkat pencapaian kinerja baik.

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna tercapainya sasaran sebagaimana yang telah diuraikan diatas, antara lain:

1. Adanya peraturan-peraturan perundangan serta pedoman yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
2. Terpenuhinya kebutuhan Anggaran/Dana untuk melaksanakan kegiatan;
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai;
4. Koordinasi dan kerjasama antar staf dan pimpinan serta dengan instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
5. Perencanaan yang sistematis dan akurat yang memberi dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dengan cermat, teliti, terkoordinir dan terencana.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing indikator program diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.69
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	6	9	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi	83,51	97,41	13,90
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman				
	Kegiatan:				
	1. Pembangunan Sanitasi				
	2. Pembangunan Sanitasi (DAK Penugasan)				
		Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih	87,91	93,58	5,67
	3. Sistem Penyediaan Air Minum SPAM				
	4. Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK Reguler)				
		Persentase Luas Permukiman Kumuh	97,52	99,60	2,08
	5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah Masyarakat Berpenghasilan Rendah				
	6. Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (DAK)				
	7. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan				
2	- Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau	62	89,03	27,03
	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang				
	Kegiatan:				
	1. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
	2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
	a. Pelayanan Rekomendasi perijinan perumahan (pengesahan site plan)				
	b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PSU Perumahan				
	c. Fasilitasi Pertanahan Kabupaten				
	d. Pelayanan Rekomendasi Perijinan Perumahan				
	e. Peningkatan Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)				

	3. Pembangunan Infrastruktur Penataan Ruang				
	Program Perencanaan Penataan Ruang				
	Kegiatan:				
	4. Perencanaan Tata Ruang				
	a. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang				
	b. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL				
	c. Survey dan Pemetaan				
	5. Pembinaan Tata Ruang				
3	- Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Drainase	Persentase bangunan yang laik fungsi	0	86,36	0
	Program Penataan Bangunan Gedung				
	Kegiatan:				
	1. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung				
	2. Peningkatan dan Pembinaan Jasa Konstruksi				
	a. Peningkatan Ijin Usaha Jasa Konstruksi				
	b. Peningkatan Kompetensi Masyarakat Jasa Konstruksi				
		Persentase berkurangnya Jumlah titik genangan air	65	88,86	23,86
	3. Pembangunan dan Normalisasi Sistem Saluran Drainase/gorong-gorong				

5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Urusan Perumahan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Persentase Rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 100% dan dapat mengalami kemajuan sebesar 81,15%, dengan dukungan melalui kegiatan:

1. Pembangunan Sanitasi

Tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.894.984.660,89 dan terealisasi sebesar Rp. 3.797.613.565,90 (97,50%) terdiri dari 50 paket pekerjaan / lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Sumenep

2. Pembangunan Sanitasi (DAK Reguler).

Tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 297.500.000,00 sebagai anggaran operasional dan terealisasi sebesar Rp. 289.490.800,00 (97,31%) dan anggaran fisik sebesar Rp. 5.652.500,00 yang terdiri dari 17 paket pekerjaan / lokasi.

2. Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 89%, dengan hasil realisasi sebesar 81,15%, dengan dukungan kegiatan :

1. Sistem Penyediaan Air Minum SPAM.

Tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.637.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.249.788.264,51 (94,15%) terdiri dari 39 paket pekerjaan / lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Sumenep yang rawan air minum/bersih

2. Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK Penugasan)

Tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.872.087.231,20 dan terealisasi sebesar Rp. 1.741.150.109,20 (93,01%) terdiri dari 8 paket pekerjaan / lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Sumenep yang rawan air minum/bersih/

3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini berupa Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 305.024.500,00 dan terealisasi 100%.

Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena anggaran yang mendukung sebagian besar masih bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK), yang kemudian difokuskan untuk penanganan Covid – 19.

3. Persentase luas pemukiman kumuh

Capaian tahun terakhir indikator Persentase Lingkungan pemukiman kumuh ditargetkan tersisa sebesar 0% dan terealisasi 0,10%, dengan dukungan kegiatan :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan

Tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 580.942.503,09 dan terealisasi sebesar Rp. 578.612.503,00 (99,60%).

Indikator ini juga didukung oleh pelaksanaan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R di Kec. Sapeken

Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena Kegiatan Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran.

2. Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni DAK Tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 77.381.000,00 sebagai anggaran operasional dan terealisasi sebesar Rp. 61.256.000,00, dan anggaran fisik sebesar Rp. 1.627.500,00 berupa rehab 93 unit rumah tidak layak huni di Kec. Kalianget.

4. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau

Pada tahun 2020 Luasan RTH Publik (Kawasan Perkotaan) mencapai 26% dari target sebesar 37% atau telah mencapai luasan 392,18 Ha. Capaian ini tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena adanya Refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid - 19, sedangkan anggaran yang ada lebih dimaksimalkan untuk pemeliharaan RTH dengan kegiatan yang mendukung indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.520.507.307,40 dan terealisasi sebesar Rp. 1.346.628.658,50 (88,56%) berupa Pembangunan RTH IKK Kecamatan Batang-Batang, Pembangunan Pintu Gerbang Batas Kabupaten (Kec. Pasongsongan) dan Pembangunan RTH Taman Potre Koning.

2. Pembangunan Infrastruktur Penataan Ruang

Tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.241.848.317,53 dan terealisasi sebesar Rp. 1.133.675.296,09 (91,29%) terdiri dari 18 paket pekerjaan perencanaan (konsultasi), sementara pekerjaan fisiknya direfocusing untuk anggaran penanganan Covid - 19.

Selain kegiatan yang berorientasi Fisik tersebut terdapat pula beberapa kegiatan yang bersifat administratif sebagai kegiatan pendukung yaitu :

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a. Fasilitas Pertanahan Kabupaten
 - b. Peningkatan Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PSU Perumahan
 - d. Pelayanan Rekomendasi Perijinan Perumahan.
4. Perencanaan Tata Ruang
- a. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang
 - b. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
 - c. Survey dan Pemetaan
5. Pembinaan Tata Ruang
- a. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sumenep
 - b. Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sumenep

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dilapangan melalui kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan dukungan Satgas RTH yang selalu berupaya bekerja secara maksimal dalam merawat RTH yang telah dibangun.

5. Persentase Bangunan yang laik fungsi

Capaian tahun terakhir indikator Persentase Bangunan Gedung negara yang laik fungsi dapat terealisasi sebesar 60% dari target sebesar 85%, dengan dukungan kegiatan :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung, Tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.874.526.332,12 dan terealisasi sebesar Rp. 44.971.502.992,46 (86,29%) terdiri dari beberapa paket pekerjaan / lokasi diantaranya : Pembangunan Gedung Sanika Satya Wada POLRES Sumenep (lanjutan) Polres Kab. Sumenep, Pembangunan Gedung Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Pembangunan Gedung ex. Kawasan Rumdis Guru Jl. K.H Agus Salim, Pembangunan Gedung Hemodialisa RSUD H. Moh. Anwar Kab. Sumenep, dll. Tingkat realisasi

kegiatan ini tergolong rendah disebabkan karena adanya Refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid - 19.

6. Persentase berkurangnya Jumlah titik genangan air

Capaian tahun terakhir indikator Persentase berkurangnya Jumlah titik genangan air dapat terealisasi sebesar 35% dari target 0%, dengan dukungan kegiatan :

1. Pembangunan dan Normalisasi Sistem Saluran Drainase/gorong-gorong, Tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.549.484.115,59 dan terealisasi sebesar Rp. 1.376.868.200,61 (88,86%) terdiri dari 6 pekerjaan perencanaan (konsultasi). Tingkat realisasi kegiatan ini tergolong rendah disebabkan karena anggaran untuk pekerjaan fisiknya difocusing untuk anggaran penanganan Covid – 19 sehingga tidak dapat dilaksanakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Urusan Perumahan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.70
Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/Perumahan Secara Memadai				
1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi	100%	83,51%	83,51%
1.1.1	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman				
	Kegiatan:				
1.1.1.1	Pembangunan Sanitasi				
1.1.1.2	Pembangunan Sanitasi (DAK Penugasan)				

1.1.1.3	Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih	95%	83,51%	87,91%
1.1.1.4	Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK Reguler)				
1.1.1.5	Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (DAK	Persentase Luas Permukiman Kumuh	0%	2,89%	97,11%
1.1.1.6	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Persentase rumah layak huni	97,79	87,64	10,15
1.1.1.7	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan				
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Terbuka Hijau				
2.1	Sasaran 1 : Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau	42%	26%	70,27%
2.1.1	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang				
	Kegiatan:				
2.1.1.1	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
2.1.1.2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
2.1.1.3	Pembangunan Infrastruktur Penataan Ruang				
2.1.2	Program Perencanaan Penataan Ruang				
	Kegiatan:				
2.1.2.1	Perencanaan Tata Ruang				
2.1.2.2	Pembinaan Tata Ruang				
3	Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Drainase				
3.1	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Drainase	Persentase bangunan yang laik fungsi	85%	0%	0%
3.1.1	Program Penataan Bangunan Gedung				
	Kegiatan:				
3.1.1.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung				
3.1.1.2	Peningkatan dan Pembinaan Jasa Konstruksi				
3.1.1.3	Pembangunan dan Normalisasi Sistem Saluran Drainase/gorong-gorong	Persentase berkurangnya Jumlah titik genangan air	0%	35%	65%

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN SUMENEP

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (Rp)			SISA ANGGARAN		
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (%)		(Rp)	%	
		1	04	01	00	00	BELANJA DAERAH	80.975.883.275,82	71.031.453.922,27	87,72	9.944.429.353,55	12,28
		1	04	01	00	00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.700.455.234,00	6.525.078.221,00	84,74	1.175.377.013,00	15,26
		1	04	01	00	00	BELANJA LANGSUNG	73.275.428.041,82	64.506.375.701,27	88,03	8.769.052.340,55	11,97
1	03	1	04	01	26		Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	2.942.928.124,93	2.655.521.704,59	90,23	287.406.420,34	9,77
1	03	1	04	01	26	01	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.520.507.307,40	1.346.628.658,50	88,56	173.878.648,90	11,44
1	03	1	04	01	26	02	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	180.572.500,00	175.217.750,00	97,03	5.354.750,00	2,97
1	03	1	04	01	26	03	Pembangunan Infrastruktur Penataan Ruang	1.241.848.317,53	1.133.675.296,09	91,29	108.173.021,44	8,71
1	03	1	04	01	27		Program Perencanaan Penataan Ruang	574.551.500,00	504.607.460,00	87,83	69.944.040,00	12,17
1	03	1	04	01	27	01	Perencanaan Tata Ruang	271.415.500,00	228.633.060,00	84,24	42.782.440,00	15,76
1	03	1	04	01	27	02	Pembinaan Tata Ruang	303.136.000,00	275.974.400,00	91,04	27.161.600,00	8,96
1	03	1	04	01	28		Program Penataan Bangunan Gedung	53.727.435.747,71	46.400.201.793,07	86,36	7.327.233.954,64	13,64
1	03	1	04	01	28	01	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung	52.115.238.632,12	44.971.502.992,46	86,29	7.143.735.639,66	13,71
1	03	1	04	01	28	02	Peningkatan dan Pembinaan Jasa konstruksi	62.713.000,00	51.830.600,00	82,65	10.882.400,00	17,35
1	03	1	04	01	28	03	Pembangunan dan Normalisasi Sistem Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.549.484.115,59	1.376.868.200,61	88,86	172.615.914,98	11,14
1	03	1	04	01	28	04	Penataan dan Revitalisasi Kawasan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	04	01	01		Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.929.547.474,00	1.596.293.210,00	82,73	333.254.264,00	17,27

		1	04	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.729.000,00	15.384.000,00	97,81	345.000,00	2,19
		1	04	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.600.000,00	166.229.798,00	70,56	69.370.202,00	29,44
		1	04	01	01	03	Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	13.601.000,00	13.108.000,00	96,38	493.000,00	3,62
		1	04	01	01	04	Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	124.407.600,00	94.039.900,00	75,59	30.367.700,00	24,41
		1	04	01	01	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.900.000,00	29.675.000,00	99,25	225.000,00	0,75
		1	04	01	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	169.400.000,00	65.475.000,00	38,65	103.925.000,00	61,35
		1	04	01	01	07	Penyediaan Makanan dan Minuman	73.800.000,00	73.250.000,00	99,25	550.000,00	0,75
		1	04	01	01	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	159.040.000,00	98.127.312,00	61,70	60.912.688,00	38,30
		1	04	01	01	11	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	283.509.874,00	240.199.800,00	84,72	43.310.074,00	15,28
		1	04	01	01	15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor /Rumah Dinas	462.800.000,00	445.050.000,00	96,16	17.750.000,00	3,84
		1	04	01	01	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor /Rumah Dinas	102.100.000,00	100.783.000,00	98,71	1.317.000,00	1,29
		1	04	01	01	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	165.760.000,00	161.734.400,00	97,57	4.025.600,00	2,43
		1	04	01	01	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas	93.900.000,00	93.237.000,00	99,29	663.000,00	0,71
		1	04	01	02		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.100.000,00	40.000.000,00	99,75	100.000,00	0,25
		1	04	01	02	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	04	01	02	02	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	40.100.000,00	40.000.000,00	99,75	100.000,00	0,25
		1	04	01	03		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.627.300,00	108.317.200,00	98,80	1.310.100,00	1,20
		1	04	01	03	01	Penyusunan Laporan Keuangan	50.393.500,00	49.856.000,00	98,93	537.500,00	1,07
		1	04	01	03	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.233.800,00	58.461.200,00	98,70	772.600,00	1,30
		1	04	01	15		Program Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	13.951.237.895,18	13.201.434.333,61	94,63	749.803.561,57	5,37
		1	04	01	15	01	Pembangunan Sanitasi	3.894.984.660,89	3.795.996.265,90	97,46	98.988.394,99	2,54
		1	04	01	15	02	Pembangunan Sanitasi (DAK)	297.500.000,00	289.490.800,00	97,31	8.009.200,00	2,69
		1	04	01	15	03	Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	6.637.940.000,00	6.249.788.264,51	94,15	388.151.735,49	5,85

		1	04	01	15	04	Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK)	1.872.087.231,20	1.741.150.109,20	93,01	130.937.122,00	6,99
		1	04	01	15	05	Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	285.378.000,00	191.956.741,00	67,26	93.421.259,00	32,74
		1	04	01	15	06	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	305.024.500,00	293.183.650,00	96,12	11.840.850,00	3,88
		1	04	01	15	07	Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (DAK)	77.381.000,00	61.256.000,00	79,16	16.125.000,00	20,84
		1	04	01	15	08	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan	580.942.503,09	578.612.503,00	99,60	2.330.000,09	0,40

PENUTUP

Masih belum tercapainya tujuan program dan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep tahun-tahun sebelumnya, merupakan indikator yang menunjukkan adanya keterbatasan dan kendala di lapangan yang belum dapat diatasi.

Hambatan permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep tersebut, tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep di masa – masa mendatang.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;
- Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;
- Belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan yang dibuat sehingga masih ditemui selisih nilai penyerapan dengan pagu dana, waktu penyerapan dengan rencana pelaksanaan serta ketetapan waktu pelaporan dan lain-lain;
- Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
- Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan motivasi yang mendorong etos kerja bagi aparatur pemerintahan;

- Adanya perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir dan komprehensif;
- Pengembangan sistem jaringan informasi guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.

Disadari bahwa pada prinsipnya peningkatan kinerja itu akan dapat dicapai apabila didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, inovasi – inovasi teknologi terapan, aspek kelembagaan yang memadai, iklim usaha yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Disamping itu dalam pelaksanaan program diperlukan adanya persamaan persepsi dalam menyikapi segala problematika yang dihadapi serta upaya-upaya pemecahannya. Dengan demikian akan terjadi kesatuan pemikiran dan tindakan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, baik yang bersumber dari dana APBD maupun dana APBN.

Kiranya dalam penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2020 masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran khususnya dalam penerapannya nanti dilapangan sangat kami harapkan.

Sumenep,

Februari 2021

**KEPALA DINAS
PERUMAHN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN SUMENEP**



Ir. MOHAMMAD JAKFAR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630314 199210 1 002